

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Taman Wisata Alam Danau Pulau Satonda**

Danau Pulau Satonda merupakan tempat wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Dompu, NTB. Danau ini mempunyai keunikan karena airnya asin seperti air laut. Diperkirakan air danau ini asin karena tercampur dengan air laut yang meluap dan terperangkap di danau pada saat gunung Tambora meletus (mirip dengan danau Kakaban). Danau Pulau Satonda dengan gunung Tambora sangatlah dekat dan seperti diketahui letusan gunung Tambora merupakan letusan yang sangat dahsyat sehingga sangat mungkin menimbulkan gelombang pasang (tsunami) yang dahsyat pula. Luas Danau Pulau Satonda sekitar 2,5 km<sup>2</sup> dan belum diketahui jenis habitat yang ada di dalam danau ini karena belum pernah dilakukan penelitian.

#### **2.2 Ekowisata**

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Danau Pulau Satonda, seperti *snorkeling* menikmati pemandangan bawah laut dengan terumbu karang yang sangat indah *diving*, serta pemandangan danau.

#### **2.3 Ekowisata Berbasis Masyarakat**

Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial ekowisata adalah suatu langkah lebih lanjut dengan mengembangkan bentuk ekowisata dimana

masyarakat lokal yang mempunyai kendali penuh, dan keterlibatan di dalamnya baik itu di manajemen dan pengembangannya, dan proporsi yang utama menyangkut sisa manfaat di dalam masyarakat (WWF International, 2001). Ekowisata berbasis masyarakat dapat membantu memelihara penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, memelihara kedua-duanya adalah tanggung jawab kolektif dan inisiatif individu di dalam masyarakat tersebut. Definisi dan penggunaan dari bentuk terminologi dan ekowisata berbasis masyarakat bisa berubah-ubah dari satu negeri atau daerah lain, tetapi hanyalah prinsip sosial dan tanggungjawab lingkungan disetiap tindakan (Anonim, 2006).

WWF (*World Wide Fund for Nature*) *Guidelines for Community-Based* (Anonim, 2001) menyebutkan syarat-syarat untuk memutuskan pengembangan bisnis ekowisata sebagai berikut:

- 1) Kerangka ekonomi dan politik yang mendukung perdagangan yang efektif dan investasi yang aman
- 2) Perundang-undangan ditingkat nasional yang tidak menghalangi pendapatan dari wisata diperoleh dan berada ditingkat komunitas lokal
- 3) Tercukupinya hak-hak kepemilikan yang ada dalam komunitas lokal
- 4) Keamanan pengunjung terjamin
- 5) Risiko kesehatan yang relatif rendah, akses yang cukup mudah ke pelayanan medis dan persediaan air bersih yang cukup
- 6) Tersedianya fasilitas fisik dan telekomunikasi dari dan ke wilayah tersebut

Adapun syarat-syarat dasar untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat seperti tercantum dalam buku tersebut adalah:

- 1) Lanskap atau flora fauna yang dianggap menarik bagi para pengunjung khusus atau bagi pengunjung yang lebih umum
- 2) Ekosistem yang masih dapat menerima kedatangan jumlah pengunjung tertentu tanpa menimbulkan kerusakan
- 3) Komunitas lokal yang sadar akan kesempatan-kesempatan potensial, resiko dan perubahan yang akan terjadi, serta memiliki ketertarikan untuk menerima kedatangan pengunjung
- 4) Adanya struktur yang potensial untuk pengambilan keputusan komunitas yang efektif
- 5) Tidak adanya ancaman yang nyata-nyata dan tidak bisa dihindari atau dicegah terhadap budaya dan tradisi lokal
- 6) Penaksiran pasar awal menunjukkan adanya permintaan yang potensial untuk ekowisata, dan terdapat cara yang efektif untuk mengakses pasar tersebut. Selain itu juga harus diketahui bahwa pasar potensial tersebut tidak terlalu banyak menerima penawaran ekowisata.

Sesuai dengan yang tercantum dalam *Guidelines for Community-Based* (Anonim, 2001) aspek dari komunitas untuk terlibat dalam pengembangan ekowisata, adalah:

- 1) Kemampuan menjadi tuan rumah penginapan
- 2) Keterampilan dasar bahasa Inggris

- 3) Keterampilan computer
- 4) Keterampilan pengelolaan keuangan
- 5) Keterampilan pemasaran
- 6) Keterbukaan terhadap pengunjung

Adanya potensi wisata di suatu tempat akan memberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mackinnon et al (1990) menyatakan bahwa potensi pariwisata disekitar kawasan yang dilindungi merupakan salah satu cara terbaik untuk mendatangkan keuntungan ekonomi kawasan terpencil, dengan cara menyediakan kesempatan kerja masyarakat setempat, merancang pasar setempat, memperbaiki sarana dan komunikasi. Muntasib et al. (2004) menyatakan beberapa prinsip dasar potensi ekowisata, yaitu:

- 1) Berhubungan/kontak langsung dengan alam (*Touch with nature*)
- 2) Pengalaman yang bermanfaat secara pribadi dan social
- 3) Bukan wisata massal
- 4) Program-programnya membuat tantangan fisik dan mental bagi wisatawan
- 5) Interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat
- 6) Adaptif (menyesuaikan) terhadap kondisi akomodasi pedesaan; dan
- 7) Pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan.

Usman (1999) mengemukakan bahwa potensi ekowisata Indonesia, hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep potensi wisata dengan melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta masyarakat (*community based ecotourism*), pada

dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan.

Peran Pemerintah kabupaten Dompu dalam membantu pengelolaan kawasan ekowisata di Taman Wisata Alam sangat penting. Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah khususnya PEMDA NTB telah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Seperti misalnya, Peraturan Daerah kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2002 tentang pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan. Dalam konsideran menimbang huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2002 tersirat adanya pengakuan dari Pemerintah Daerah kabupaten Dompu bahwa hutan saat ini telah mengalami penurunan kualitas.

Kebijakan PEMDA NTB dalam kaitannya dengan kebijakan perlindungan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan ekowisata termasuk taman nasional hingga saat ini adalah nol karena belum ada produk hukum yang diterbitkan PEMDA Kabupaten Dompu maupun Keputusan Bupati Sumbawa (Riyanto, 2005).

## **2.4 Penawaran dan Permintaan Pariwisata (*Supply and Demand*)**

*Recreation demand* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan permintaan rekreasi menurut Avenzora (2003) adalah tentang: (1) siapa yang meminta, (2) apa dan berapa banyak yang diminta, dan (3) kapan diminta. Sedangkan *recreation supply* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan penawaran rekreasi dapat dipahami

melalui pengertian tentang: (1) apa dan berapa banyak yang dapat diberikan, (2) kapan dapat diberikan, dan (3) kepada siapa dapat diberikan.

Penawaran pariwisata yang berupa produk kepariwisataan terdiri atas tiga komponen yaitu atraksi wisata, jasa wisata dan angkutan wisata (Soekadijo, 2000). Suatu daerah dapat dijadikan tempat tujuan wisata kalau kondisinya mendukung sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut sebagai modal atau sumberdaya kepariwisataan. Sumberdaya yang dapat menarik kedatangan wisatawan ada tiga yaitu alam, kebudayaan, dan manusia itu sendiri.

Menurut Avenzora (2003), sumberdaya wisata dapat didefinisikan sebagai “suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang mengandung elemen-elemen ruang tertentu yang dapat: (1) menarik minat orang untuk berekreasi, (2) menampung kegiatan rekreasi, dan (3) memberikan kepuasan orang berekreasi”. Sumberdaya wisata juga identik dengan istilah ruang atau *space*. *Space* merupakan suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang memiliki daya tarik tertentu berupa air, udara, tanah dan sebagainya yang mampu menarik orang untuk berekreasi atau berwisata dan menampung orang untuk melakukan kegiatan wisata. Sudarto (1999) menyatakan unsur paling penting yang menjadi daya tarik dari sebuah daerah tujuan wisata adalah:

- 1) Kondisi alam, contoh hutan hujan tropis dan terumbu karang
- 2) Kondisi flora dan fauna yang unik, langka dan endemik,
- 3) Kondisi fenomena alam seperti pulau Satonda

- 4) Kondisi adat dan budaya, seperti budaya Bima

## **2.5 Motivasi**

Setiap tindakan manusia digerakkan dan dilatarbelakangi oleh motif tertentu. Tanpa motivasi orang tidak akan berbuat apa-apa. Motivasi adalah suatu bentuk dorongan minat dan hati yang menjadi penggerak utama seseorang, sesebuah keluarga atau organisasi untuk mencapai apa yang diinginkan (Suhaidin, 2008).

Motif didefinisikan sebagai suatu alasan/dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu/melakukan tindakan/bersikap tertentu. Suatu motif umumnya terdapat dua unsur pokok yaitu unsur dorongan/kebutuhan dan unsur tujuan. Proses timbal balik antara kedua unsur tersebut terjadi dalam diri manusia, namun dapat dipengaruhi oleh hal-hal di luar dari manusia, misalnya keadaan cuaca, kondisi lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu dapat saja terjadi perubahan motivasi dalam waktu relatif singkat, jika ternyata motivasi yang pertama mendapat hambatan atau tidak mungkin terpenuhi (Handoko, 1992) dalam (Naibaho, 2002).

## **2.6 Minat**

Minat mempunyai karakteristik pokok yaitu melakukan kegiatan yang dipilih sendiri dan menyenangkan sehingga dapat membentuk suatu kebiasaan dalam diri seseorang. Minat dan motivasi memiliki hubungan dengan segi kondisi, namun minat lebih dekat pada perilaku (Abadi, 2006).

## **2.7 Persepsi**

Persepsi adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap obyek tertentu yang dihasilkan oleh kemampuan mengorganisasi pengamatan. Selanjutnya persepsi ditentukan oleh dua faktor dalam diri individu (faktor internal) dan faktor luar individu (faktor eksternal). Faktor internal meliputi kecerdasan, minat, emosi, pendidikan, pendapatan, kapasitas alat indera dan jenis kelamin. Faktor eksternal meliputi pengaruh kelompok, pengalaman masa lalu dan perbedaan latar belakang sosial budaya. Pandangan atau penilaian ini dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan (Kayam, 1985) dalam (Entebe, 2002)

## **2.8 Masyarakat Lokal dan Partisipasinya**

Partisipasi menurut Ndraha (1987) meliputi tiga hal yaitu partisipasi dalam memikul beban pembangunan (beban fisik dan non fisik), partisipasi dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan dan partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan. Ife (2005) mengemukakan beberapa keadaan atau kondisi seseorang akan berpartisipasi yaitu

- 1) Jika kegiatan tersebut penting bagi mereka
- 2) Mereka merasa bahwa tindakan mereka akan membuat suatu perubahan
- 3) Diakui dan dihargai adanya perbedaan-perbedaan partisipasi; dan
- 4) Kemungkinan mereka untuk berpartisipasi

Anonim (2003) dalam Abikusno (2005) menyatakan bahwa prinsip partisipasi masyarakat adalah dilibatkannya masyarakat setempat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan. Adapun



kriteria yang dimaksudkan dalam kegiatan pelibatan masyarakat tersebut antara lain adalah:

- 1) Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata
- 2) Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata
- 3) Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan
- 4) Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan wisata
- 5) Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jain (2000) ada tujuh macam tipe partisipasi yang ada pada masyarakat, antara lain:

- 1) **Partisipasi pasif**, tipe partisipasi yang tidak memperhitungkan tanggapan partisipan dalam pertimbangan dan hasilnya telah terlebih dahulu ditetapkan. Informasi hanya dibagikan pada external institusi
- 2) **Partisipasi dalam pemberian informasi**, orang memberikan jawaban atas pertanyaan dimana mereka tidak punya kesempatan untuk mempengaruhi dalam konteks wawancara dan seringkali hal baru tidak dibagikan

- 3) **Partisipasi dalam bentuk konsultasi**, orang dikonsultankan dan pendapat mereka termasuk ke dalam hitungan tetapi mereka tidak termasuk dalam pembuatan keputusan
- 4) **Partisipasi aktif**, meliputi orang yang memberikan dorongan dalam materi dan dorongan langsung untuk pelayanan yang disediakan. Dalam beberapa contoh kasus, tidak adanya peraturan yang dimasukkan sekalipun dorongan tersebut telah berakhir
- 5) **Partisipasi fungsional**, partisipasi terjadi dengan pembentukan dalam grup dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti partisipasi pada umumnya terjadi hanya setelah keputusan utama telah diambil;

Beberapa contoh bentuk partisipasi dalam wisata berbasis masyarakat (Jain, 2000)

- 1) **Partisipasi dalam perencanaan**, partisipan memainkan peranan penting dalam menyampaikan informasi, analisisnya dan pemanfaatan berikutnya yakni dalam proses pembelajaran dan perencanaan. Aspek penting untuk masyarakat berdasarkan kepariwisataan adalah partisipasi dalam menilai pilihan dan ekonominya serta kemungkinan konservasinya
- 2) **Partisipasi dalam pelaksanaan dan perjalanan prosesnya**, wisata berbasis masyarakat memerlukan pelaksanaan struktur dan penyusunan untuk menjalankan aktifitas. Partisipan memegang peranan penting untuk melaksanakan aktifitas, menyusun institusi dan dalam operasi perusahaan; dan

- 3) **Partisipasi dalam pembuatan keputusan dan manajemen**, partisipan memainkan peran penting dalam pilihan, desain dan manajemen wisata berbasis masyarakat, termasuk perusahaan wisata, aktifitas konservasi, monitoring serta evaluasi; dan
- 4) **Partisipasi dalam pembagian keuntungan ekonomi**, dalam hal ini perbedaan yang dibuat mengenai tingkatan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan aktifitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Perbedaan awal antara tipe ini dan “perbuatan awal kepemilikan”, bahwa partisipan hanya mempunyai sedikit atau tidak dikatakan dalam aktifitas pilihan.

Pelaksanaan ekowisata harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pemantauan karena masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata. Dengan demikian, kegiatan wisata alam diharapkan mampu mengupayakan keuntungan finansial sekaligus sebagai alternatif peningkatan taraf hidup masyarakat.

Masyarakat harus diperlakukan sebagai subyek pembangunan karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu masyarakat lokal merupakan ”pemilik” langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisatawan lainnya berada ditangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh

sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.

Masyarakat lokal sudah terlebih dahulu terlibat dalam pengelolaan aktivitas pariwisata sebelum ada kegiatan pengembangan dan perencanaan. Oleh sebab itu peran mereka terutama tampak dalam bentuk penyediaan akomodasi dan jasa guiding dan penyediaan tenaga kerja. Selain itu masyarakat lokal biasanya juga mempunyai tradisi dan kearifan lokal dalam pemeliharaan sumberdaya pariwisata yang tidak dimiliki oleh pelaku pariwisata lainnya (Damanik, 2006). Sedangkan menurut Rahardjo (2005) selain yang disebutkan oleh Damanik, bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal antara lain:

- 1) Membentuk joint venture dengan tour operator dimana masyarakat menyediakan lebih banyak service sedangkan pihak swasta hanya fokus pada promosi dan pemasaran
- 2) Menyediakan layanan kepada tour operator
- 3) Menyewakan lahan kepada pihak tour operator. Dalam hal ini masyarakat masih memungkinkan untuk melakukan monitoring atas dampak dari aktifitas wisata
- 4) Mengembangkan program sendiri secara mandiri dan
- 5) Bekerja sebagai *staf tour operator* baik full time atau part time

Masyarakat sekitar kawasan taman wisata Alam sebagai integral dari kawasan taman wisata alam dapat berperan baik secara langsung maupun tak langsung. Masyarakat lokal tidak hanya sebagai “*host communities*” dalam kegiatan ekowisata, tetapi sebagai pengelola yang juga memiliki kewenangan dalam menentukan disetiap

aktivitas yang berkaitan dengan ekowisata tersebut. Peran serta masyarakat tersebut dalam suatu kawasan konservasi akan terlihat seberapa jauh manfaat yang akan diperoleh masyarakat sekitar.

Pengembangan ekowisata dengan keterlibatan masyarakat lokal relatif mudah dilaksanakan karena memiliki beberapa keunikan

- 1) Jumlah wisatawan berskala kecil sehingga lebih mudah dikoordinir dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap alam relative kecil dibanding pariwisata massal
- 2) Ekowisata berbasis masyarakat lokal memiliki peluang dalam mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil sehingga dapat dikelola dan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal
- 3) Dengan peluang yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di sekitarnya akan memberikan peluang lebih besar pula dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan; dan
- 4) Memberikan pemahaman pentingnya keberlanjutan budaya (cultural sustainability) serta meningkatkan penghargaan wisatawan terhadap kebudayaan lokal.

## **2.9 Analisis SWOT**

SWOT adalah singkatan Strengths (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) yang merupakan lingkungan internal serta Opportunities (peluang) dan *Threats* (ancaman) yang merupakan lingkungan eksternal. Rangkuti (2006) menulis bahwa analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan *Strengths* dan

*Opportunities*, namun secara bersamaan dapat meminimalkan *Weaknesses* dan *Threats*.

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-relasi sumberdaya ekowisata dengan sumberdaya yang lain. Jadi kekuatan dan kelemahan sumberdaya tersebut perlu ditegaskan sejak awal. Agak berbeda dengan studi kelayakan, analisis sumberdaya ekowisata sudah harus menghasilkan sintesis yang akan dijadikan basis proyek. Oleh sebab itu semua pihak, khususnya masyarakat lokal, perlu mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh kawasan dan objek ekowisata tersebut.

Menurut Damanik (2006), agar hasil analisis SWOT sebaiknya menggambarkan.

- 1) Perkembangan produk dan pasar ekowisata itu sendiri
- 2) Organisasi dan kelembagaan pariwisata
- 3) Peluang-peluang pengembangan inti kegiatan ekowisata (core activities) dan
- 4) Jasa-jasa dan kegiatan lain yang mungkin dikembangkan.

Menurut Santoso dan Tangkilisan (tanpa tahun) menyebutkan bahwa ada beberapa strategi yang diperoleh dari teknik analisa SWOT ini sebagai berikut:

- 1) Strategi SO (*Strength Opportunity*): memperoleh keuntungan dari peluang yang tersedia di lingkungan eksternal
- 2) Strategi WO (*Weakness Opprtunity*): memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar

- 3) Strategi ST (*Strength Threat*): menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar
- 4) Strategi WT (*Weakness Threat*): memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.

Adapun contoh pembuatan matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Matriks SWOT**

<b>Faktor Internal</b>	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
	Menentukan faktor-faktor yang merupakan kekuatan internal	Menentukan faktor-faktor yang merupakan kelemahan internal
<b>Faktor Eksternal</b>		
<b>Peluang (Opportunity)</b> Menentukan faktor-faktor yang merupakan peluang eksternal	<b>Strategi S-O</b> Menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b>Strategi W-O</b> Menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan kelemahan
<b>Ancaman (Threat)</b> Menentukan faktor-faktor yang merupakan ancaman eksternal	<b>Strategi S-T</b> Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<b>Strategi T-W</b> Menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman